

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2018. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2013. *Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
2019. *Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Edmon Makarim. 2013. *Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2018. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Satochid Kartanegara. 1998. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- 2018, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustakahlm. 112.
- Van Hamel. 1927. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, , hlm. 21.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.
- 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.
- Mulyadi, D, L., & Sh, M. H. (2023), *Bunga rampai hukum pidana, perspektif, teoritis dan praktik*. Penerbit Alumni, Universitas Indonesia, halaman 8
- Soedikno Mertokusumo dan Prinst, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Jakarta, hal, 42
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, hal, 32
- Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, hal, 5

JURNAL/ARTIKEL

- Bantu, Sherly, Wira Franciska & Hedwig Adianto Mau. (2025). *Criminal Liability of Online Gambling Perpetrators in Indonesia According to the Electronic Information and Transactions Law*. Jurnal Impresi Indonesia, 3(9).
- Samosir, Joko Christopher, Suci Ramadani & Ismaidar Ismaidar. (2025). *Legal Review Of The Responsibility Of Online Gambling Criminal Acts In Indonesia*. International Journal of Sociology and Law, 2(2).
- Fittra, Diky Hikmatul. (2025). *Upaya Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online*. Journal of Legal Research, 7(1), 41–60.
- Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, “*Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*”, Vol. 15 No. 1, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tersedia pada JDIH DPR RI,

Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Rantauprapat, Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap

WEBSITE

<https://www.kominfo.go.id>

<https://www.komdigi.go.id>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindakpidana-lt63e226d22adc3/?page=2>

<https://jdih.dpr.go.id>

<https://peraturan.bpk.go.id>

[https://peraturan.bpk.](https://peraturan.bpk)